

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai Relasi Antara Masyarakat Dan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Perumusan Kebijakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Surabaya. Kebijakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS merupakan sebuah kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah kota Surabaya kepada seluruh masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup atau tidak terpenuhinya kesejahteraan sosial. Sebagaimana konsep kebijakan publik yang menjelaskan suatu negara pasti memiliki berbagai kebijakan publik guna mengatur, mengontrol dan salah satu langkah dalam mencapai suatu tujuan, dan keberadaan suatu kebijakan selalu ada dimana kebijakan publik selalu berubah. Perubahan yang dimaksud disini adalah mengalami pembaruan maupun membuat kebijakan yang baru dan adanya perubahan ini tergantung dengan rezim yang berkuasa saat itu. Dalam studi ini mengkaji dua aspek permasalahan, pertama membahas mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan Kebijakan PMKS, kedua mengenai relasi yang terjadi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Kata Kunci: Perumusan Kebijakan, Kebijakan Publik, Relasi Antar Aktor, Kesejahteraan Sosial, PMKS

## Abstract

This research encompasses Relation Between the Society and City Government in Creating Policy of Social Welfare Problem Bearer (PMKS) in Surabaya. The policy of PMKS is a policy that is issued by City Government of Surabaya which beset toward the poor society that powerless to fulfill their basic needs or their social welfare. As stated in the theory of public policy that describes a country must have a number of public policy to take care, to control, and to achieve goal, which some of them are tend to amend from time to time. What is meant by amendment here is that it changed or we might say the new regulator is based on the regime that has control over the country. Within this study, it investigates on two aspects. First is to cover in regards to the people that has responsibility of the making process of the PMKS Policy. Secondly, it covers a relation that occurs between Social Policy Problem Bearer and City Government of Surabaya.

Keywords: Policy Making, Public Policy, Relation Actor, Social Welfare, PMKS